

# **TESIS**

**PENGARUH DINAMIKA SEKTOR EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN**

**THE EFFECT OF THE DYNAMIC OF ECONOMIC SECTORS  
TO INCOME INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI**

**NELY AYU ADRIANI UDHAR**

**A032171003**



**PROGRAM MAGISTER**

**EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGARUH DINAMIKA SEKTOR EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN**

**THE EFFECT OF THE DYNAMIC OF ECONOMIC SECTORS  
TO INCOME INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NELY AYU ADRIANI UDHAR**

**A032171003**

**PROGRAM MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2020**

TESIS

**PENGARUH DINAMIKA SEKTOR EKONOMI TERHADAP  
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**NELY AYU ADRIANI UDHAR**  
Nomor Pokok: A032171003

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal, 14 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:  
Komisi Penasehat,

  
Dr. Agussalim, SE., M.Si  
Ketua

  
Dr. Sultan Sunab, SE., MS  
Anggota

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan dan  
Perencanaan,

  
Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

  
Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si.



# TESIS

## PENGARUH DINAMIKA SEKTOR EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**NELY AYU ADRIANI UDHAR**

**A032171003**

Telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan

Makassar,

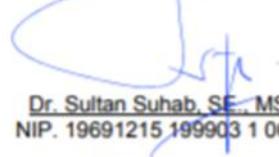
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE, M.Si  
NIP. 19670817 199103 1 006

Pembimbing II



Dr. Sultan Suhab, SE, MS  
NIP. 19691215 199903 1 002

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE, MA  
NIP. 19651012 199903 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NELY AYU ADRIANI UDHAR**  
Nomor Pokok : **A032171003**  
Program Studi : **EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2020

Yang menyatakan



**NELY AYU ADRIANI UDHAR**

## ABSTRAK

**NELY AYU ADRIANI UDHAR.** *Pengaruh Transformasi Struktural terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Agussalim dan Sultan Suhab).

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh langsung dan tidak langsung Transformasi struktural (sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier) terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa panel data (*pooled data*) yang menggabungkan data lintas daerah (*cross-section*) dan data lintas waktu (*time series*). Penganalisisan data menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sektor primer berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan berhubungan negative dan signifikan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita. Sektor sekunder berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa secara langsung pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder memberikan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan. Ketimpangan pendapatan akan menurun dengan adanya transisi menuju sektor industri. Sektor tersier berpengaruh negatif dan signifikan secara tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan. Pergeseran struktur menuju sektor tersier dari sektor pertanian dan sektor industri berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya pergeseran struktur ekonomi akan memperbaiki distribusi pendapatan.

Kata Kunci: Ketimpangan pendapatan, transformasi struktural, penyerapan tenaga kerja, pendapatan perkapita

## ABSTRACT

**NELY AYU ADRIANI UDHAR.** *The Effect of Structural Transformation to Income Inequality in South Sulawesi* (Supervised by Agussalim and Sultan Suhab).

This study aims to look at the direct and indirect effects of structural transformation (primary sector, secondary sector and tertiary sector) on income inequality through employment and per capita income in South Sulawesi.

The type of data analyzed in this study is secondary data in the form of panel data (pooled data) that combines cross-regional data (cross-section) and cross-time data (time series). Analyzing data uses the path analysis method.

The results showed that the primary sector had a positive and significant effect directly on income inequality and was negatively and indirectly related through employment and income per capita. The secondary sector has a negative and significant effect on income inequality both directly and indirectly through employment and per capita income. The results of testing the data show that the direct shift in the structure of the economy from the primary to the secondary sector has a significant influence in reducing inequality. Income inequality will decrease with the transition to the industrial sector. The tertiary sector has a negative and significant effect on income inequality through employment and per capita income in South Sulawesi. The shift in structure towards the tertiary sector from the agricultural and industrial sectors has a significant effect in reducing inequality. Thus, it can be said that a shift in economic structure will improve income distribution

Keywords: income inequality, structural transformation, employment, per capita income

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, dan shalawat tak lupa penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengangkat umatnya dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **”Pengaruh Dinamika Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada Prodi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.

Tesis ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan serta masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, Hatibuddin, S.Sos., MM dan Harmi, SP yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, terima kasih atas doa, pengertian, dan perjuangan, serta pengorbanan yang telah dicurahkan untuk penulis, tak banyak yang bisa penulis lakukan untuk membalas kasih sayang mereka, selain pengabdian serta doa yang tulus kepada ALLAH SWT agar senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, keimanan dan perlindungan. Terima kasih pula kepada kakak-kakakku Risma Aulia Udhar, S.Kel., M.si, Muhammad Rais, S.Kom, Mulya Ari Rifai Udhar, SE, Nurraya Baharuddin, Amd, Keb, Indra Tri Susmitro Udhar, SM dan Andi Nurdiana yang telah mencurahkan perhatian, waktu, dan tenaga kepada penulis serta senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan yang tiada henti. Dan terima kasih pula kepada para keponakanku yang lucu dan cerdas, Ahmad Faqiyh Dzakwan Khairy, Adelia Dwi Raihanah, Nur Fadzliil Hadi El-Fatih, Adila Mossa Nauren dan Ahmad Gafi Fasal semoga

kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, amiin. Ucapan terima kasih juga hendak penulis ucapkan kepada:

- ) Dr. Indraswati Tri Abdi Revianne, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (EPP). Terima kasih atas ilmu dan segala bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada prodi EPP .
- ) Dr. Agussalim, SE., M.Si selaku pembimbing I, yang memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan juga terima kasih atas arahan, bimbingan, saran serta waktu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini dan Dr. Sultan Suhab, SE., MS selaku pembimbing II, terima kasih atas saran, dan arahan serta waktu yang telah diberikan selama penyusunan tesis ini.
- ) Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., M.Si, Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si dan Dr.Sabir, SE., M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran sehingga penulis terpacu untuk terus belajar.
- ) Kepada Prof. Dr. Nursini, MA, Dr. Sri Unday Nurbayani, SE., M.Si dan seluruh staf P2KP Unhas yang telah layaknya keluarga baru di Unhas banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan study.
- ) Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan membagikan ilmu, menginspirasi, dan memotivasi penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama tahun perkuliahan.
- ) Seluruh Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan selama penyelesaian study.
- ) Bappeda Kabupaten Bone terkhusus untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang telah memfasilitasi, memberi bantuan, dan

memotivasi dalam penyelesaian akhir magister.

- ) Tim Rusuh Bappeda; Ita, Kak Niar, Ancha, Kak Ocing, Tina, Herul, Eko dan Filsah yang sudah layaknya saudara selama bermukim di Bone.
- ) Sothyl Guel Kaka Qarina (Alma), Kaka Cell (Susang), Kaka Nurul (Njawa) dan Kaka Mita (Kinana) yang selalu menjadi solusi dalam segala kesulitan, paling kompek powder selalu se iya sekata, seirama, simbang dan selaras.
- ) Sahabatku tercinta Unyu yang selalu setia menemani, memberikan semangat dan pertemanan yang tulus, selalu menjadi tempat terbaik untuk cerita dan tertawa bersama. Kepada Rosa, Akmal, Jaddid, dan lin yang selalu memberikan bantuan selama perkuliahan dan penyelesaian magister.
- ) Saudara-saudara Magister EPP dan ESD. Terima kasih atas segala bantuan, pembelajaran, dan kenangan yang indah yang telah diberikan selama penulis menempuh masa perkuliahan.
- ) Dan terkhusus Kepada Ade Putra, SH., MH yang selalu menemani dan mendampingi dengan tulus, senantiasa mendoakan dan menyanyangi dengan sepenuh hati.

Akhir kata, tiada kata yang patut peneliti ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita di dunia. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Watampone, 30 November 2020

**NELY AYU ADRIANI UDHAR**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	11
1.4 Manfaat Penulisan.....	12
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori .....	13
2.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan .....	13
2.1.2 Indikator Pengukuran Distribusi Pendapatan.....	17
2.1.3 Teori Transformasi Struktural .....	23
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	28
2.2.1 Hubungan Dinamika sektor ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan.....	28
2.2.2 Hubungan Penyerapan tenaga kerja Dan Ketimpangan Pendapatan .....	30
2.2.3 Hubungan Pendapatan perkapita Dan Ketimpangan Pendapatan.....	32
2.2.4 Hubungan Dinamika sektor ekonomi, Penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Perkapita .....	34
2.2.5 Hubungan Dinamika sektor ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Pendapatan Perkapita Dan Ketimpangan Pendapatan.....	38
2.3 Studi Empiris .....	39
 <b>BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	

3.1 Kerangka Pemikiran .....	46
------------------------------	----

3.2 Hipotesis .....	48
---------------------	----

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1 Jenis dan Sumber Data .....	50
---------------------------------	----

4.2 Model Analisis Data .....	51
-------------------------------	----

4.3 Uji Asumsi Klasik .....	56
-----------------------------	----

4.4 Definisi Operasional Variabel .....	59
---	----

#### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Gambaran Umum Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan .....	61
---	----

5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 .....	61
---	----

5.1.2 Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 .....	62
---	----

5.1.3 Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 .....	64
---	----

5.2 Deskripsi Data .....	65
--------------------------	----

5.2.1 Gini Rasio Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017 .....	65
--	----

5.2.2 Pendapatan Perkapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017 .....	67
--	----

5.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017 .....	69
---	----

5.2.4 Sektor Primer Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017 .....	71
---	----

5.2.5 Sektor Sekunder Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	
Periode 2015-2017.....	72
5.2.6 Sektor Tersier Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	
Periode 2015-2017.....	74
5.3 Hasil Penelitian .....	75
5.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	75
5.3.2 Hasil Analisis Pengaruh Dinamika sektor ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Pendapatan Perkapita terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan .....	79
5.3.3 Hasil Analisis Pengaruh Dinamika sektor ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Perkapita Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan .....	90
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	96
6.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Indeks Gini	20
Tabel 4.1	Identifikasi Autokorelasi	59
Tabel 5.1	Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 5.2	Hasil Uji Linearitas	78
Tabel 5.3	Pengaruh Langsung	79
Tabel 5.4	Pengaruh Tidak Langsung	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Sulawesi Selatan terhadap Nasional Tahun 2013-2017	3
Gambar 1.2	Persentase Distribusi Pendapatan Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2015	4
Gambar 1.3	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017	6
Gambar 1.4	Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja dan Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013- 2017	7
Gambar 1.5	PDRB Perkapita Sulawesi Selatan Tahun 2013- 2017 (Juta Rupiah)	8
Gambar 2.1	Kurva “U” terbalik (Hipotesis Kuznetz)	14
Gambar 2.2	Kurva Lorenz	19
Gambar 2.3	Perubahan Peranan Sektor dalam Menciptakan Produksi Nasional	35
Gambar 3.1	Kerangka Pemikiran	48
Gambar 5.1	Perkembangan Gini Rasio Periode 2015-2017	66
Gambar 5.2	Pendapatan Perkapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017	68
Gambar 5.3	Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017	70
Gambar 5.4	Sektor Primer Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017	71
Gambar 5.5	Sektor Sekunder Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017	72
Gambar 5.6	Sektor Tersier Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2017	74
Gambar 5.7	Hasil Uji Normalitas	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

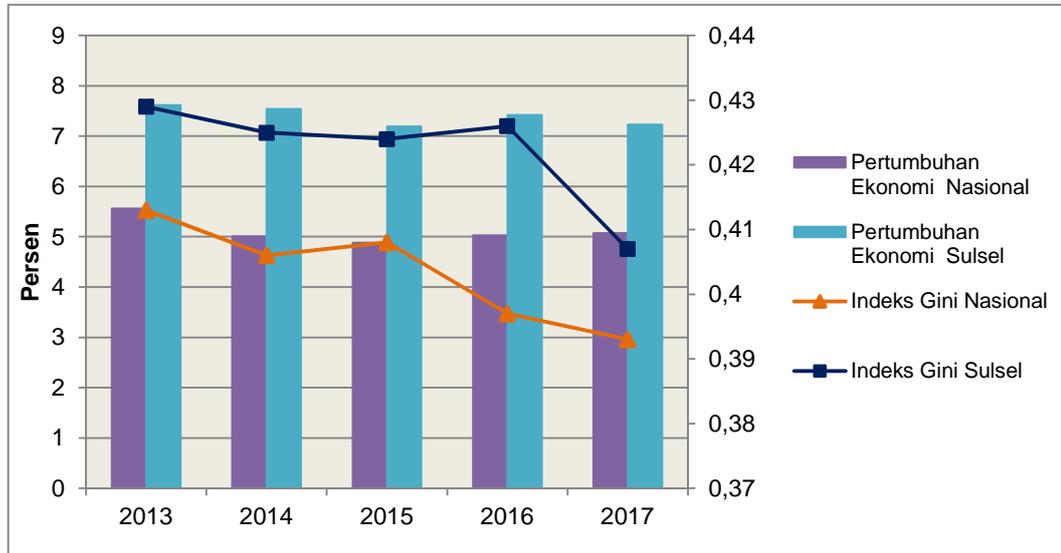
Pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomi dan sosial (Todaro, 2006). Pembangunan sejatinya ialah proses terencana menuju kondisi yang lebih baik, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita, yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi, perbaikan distribusi pendapatan dan pengurangan angka kemiskinan. Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama yakni pengurangan angka kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan atau melalui redistribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi seringkali dinilai sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu wilayah, Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi senantiasa ditonjolkan sebagai sebuah parameter kemakmuran. Namun kegigihan Indonesia dalam mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tidak diiringi dengan perbaikan distribusi pendapatan, disamping itu melahirkan praktek konglomerasi. Timbul gejala dalam perekonomian, dimana sumberdaya dan asset hanya memusat pada sekelompok kecil orang, kepemilikan usaha menumpuk pada segelintir orang, persaingan usaha tumbuh secara tidak sehat serta timbulnya perekonomian dengan wajah dualistik: makmur vs kumuh, metropolis vs terisolir (Agussalim, 2009).

Ketimpangan distribusi pendapatan kerap muncul dalam proses pembangunan, masalah ini tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, negara maju sekalipun tidak terlepas dari persoalan tersebut. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya yang akan dipengaruhi oleh karakteristik suatu negara (luas wilayah, jumlah penduduk, sumberdaya alam, struktur ekonomi dan sebagainya). Semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif kecil, sebaliknya negara sedang berkembang cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dan untuk mengatasinya relatif sulit, sehingga memerlukan perhatian khusus (Arsyad 2010).

Dalam satu dasawarsa terakhir Indonesia telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan bahkan berlangsung secara konsisten dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5.11 persen pertahun, dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07 persen. Sementara itu, Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi diluar Jawa, memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 7,23 persen pada tahun 2017, hal ini juga sekaligus menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Sulawesi Selatan**  
**terhadap Nasional Tahun 2013-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Diolah, 2019)

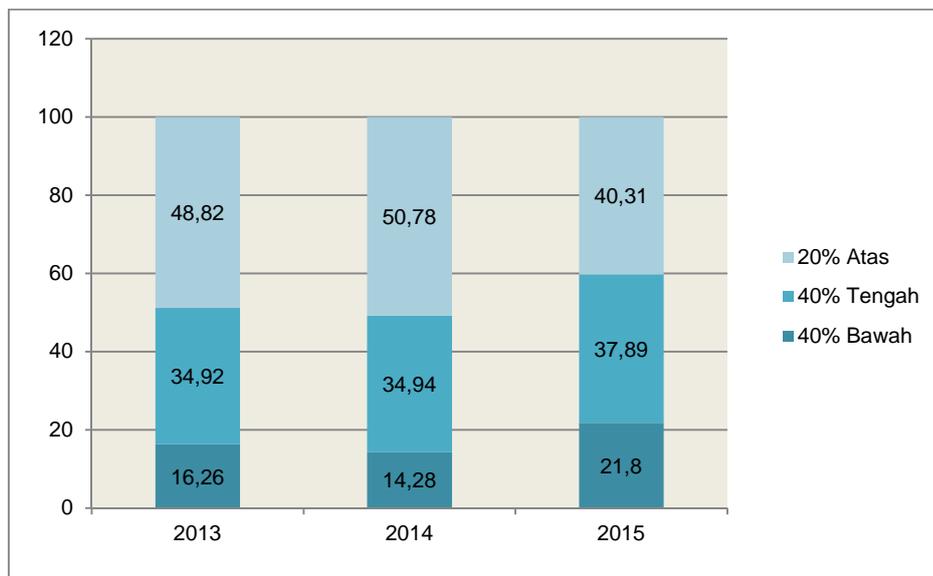
Selanjutnya data pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sangat akseleratif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,4 persen pertahun. Pencapaian ini tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional, tetapi juga menempatkan Sulawesi Selatan, bersama dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus sebagai kawasan paling dinamis di Indonesia.

Namun demikian dibalik fakta yang menggembirakan tersebut, muncul fakta lain yang merisaukan, yaitu ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Ketimpangan pendapatan yang direfleksikan dengan *gini coefficient* menunjukkan pergerakan yang begitu cepat dari 0,36 pada tahun 2008 membesar menjadi 0,407 di tahun 2017. Atau dengan kata lain, hanya dalam

sepuluh tahun derajat ketimpangan di Sulawesi Selatan dari bergerak kriteria “moderat” menuju kriteria “tinggi”. Angka 0,407 bukan hanya berada di atas angka Nasional 0,39, tetapi juga telah memposisikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, dalam lima tahun terakhir tidak hanya derajat ketimpangan pendapatan pada Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam kategori tinggi, tetapi derajat ketimpangan pendapatan tersebut juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat sangat tinggi dengan angka diatas tujuh persen setiap tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tinggi terdistribusi timpang.

**Gambar 1.2**  
**Persentase Distribusi Pendapatan Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2015**



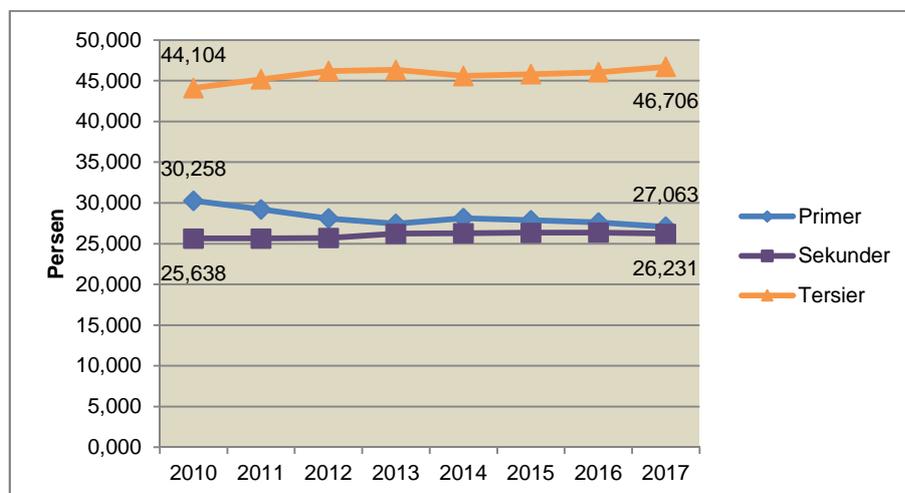
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Diolah, 2019)

Mencermati data distribusi pendapatan, distribusi pendapatan Sulawesi Selatan masih belum merata atau timpang, dimana 48,82 persen dari total pendapatan Sulawesi Selatan dinikmati oleh 20 persen berpendapatan tinggi, 34,92 persen dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan sisanya hanya 16.26 persen yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2013. Setahun berikutnya (2014) lebih memprihatinkan, setengah dari total pendapatan Sulawesi Selatan dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, dan hanya sekitar 14.28 persen yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah, atau dengan kata lain kue kesejahteraan yang dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan tinggi tiga kali lebih banyak dibanding penduduk berpendapatan rendah. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2015 yaitu proporsi distribusi pendapatan untuk 20 persen penduduk berpendapatan tinggi menurun, dan terjadi peningkatan untuk proporsi pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah, namun masih dalam kategori yang sangat timpang, yaitu hanya setengah dari proporsi 20 persen penduduk berpendapatan tinggi yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Berdasarkan data distribusi pendapatan tersebut mengindikasikan terjadinya trickle up effect dalam proses pembangunan di Sulawesi Selatan.

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan membawa serangkaian perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara atau disebut transformasi ekonomi, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor primer menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor

dalam struktur perekonomian, dari sektor primer ke sektor sekunder kemudian ke sektor tersier (Chenery dan Syrquin 1975). Semakin tinggi Produk Domestik Bruto dalam suatu masyarakat peranan sektor pertanian dalam output dan kesempatan kerja semakin menurun, sebaliknya peranan sektor industri dan jasa semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka Chenery dan Syrquin (1975) menyatakan bahwa terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian dapat ditandai dengan: a) produk domestik bruto dari sektor pertanian menurun dan sektor lainnya meningkat; b) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian semakin menurun dan sektor lainnya mengalami peningkatan; c) sifat produksi berubah menjadi bersifat industrial

**Gambar 1.3**  
**Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017**



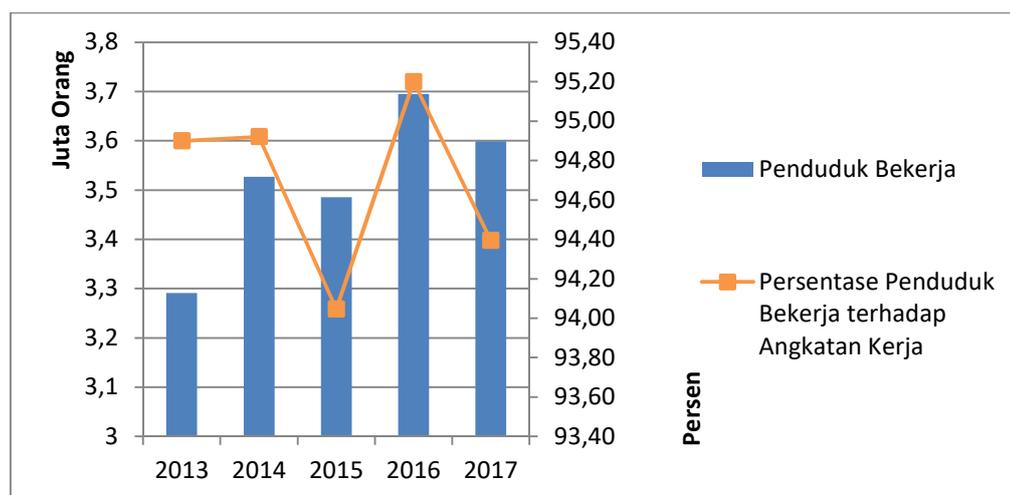
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Diolah, 2019)

Terkait dengan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada sektor pertanian. PDRB Sulawesi Selatan meskipun dari sisi dominasi sektoral tidak terjadi perubahan struktur ekonomi, tetapi berdasarkan kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB telah terjadi perubahan pada struktur yang ditandai

dengan semakin menurunnya kontribusi sektor primer dan semakin meningkatnya kontribusi sektor lainnya dalam delapan tahun terakhir.

Secara umum dalam jangka waktu tersebut, menunjukkan dominasi sektor tersier yang impresif dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Pada tahun 2010 nampak bahwa peranan sektor primer lebih dominan dibandingkan dengan sektor sekunder, akan tetapi tahun terakhir menunjukkan kondisi yang berbeda, dimana peranan sektor sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan peranan sektor primer, hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya sektor industri ditandai dengan tingginya investasi sektor industri dan pengembangan kawasan industri pada tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan pengembangan wirausahawan baru hingga 313.845 orang. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor industri di Sulawesi Selatan yang selama ini hanya didominasi oleh kota Makassar dan Luwu Timur.

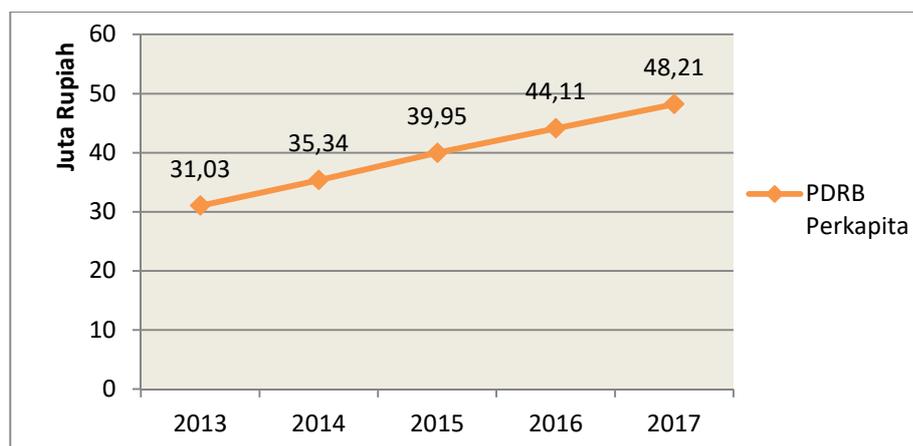
**Gambar 1.4**  
**Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja dan Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013- 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Diolah, 2019)

Data penduduk bekerja pada Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, namun masih dalam kondisi yang stabil dengan jumlah 3,5 juta orang pada tahun 2017. Sama halnya dengan proporsi penduduk bekerja terhadap angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan data yang cukup menggembirakan, dimana lebih dari 90 persen penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terserap dalam lapangan kerja dan kurang dari 10 persen sisanya yang menganggur.

**Gambar 1.5**  
**PDRB Perkapita Sulawesi Selatan Tahun 2013- 2017 (Juta Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Diolah, 2019)

Sementara itu, PDRB perkapita Sulawesi Selatan dari tahun ketahun terus meningkat dan dinilai cukup baik serta akseleratif dengan pertumbuhan rata-rata 11,75 persen selama lima tahun. Tahun 2017 pendapatan perkapita penduduk Sulawesi Selatan telah mendekati angka 50 juta rupiah pertahun yaitu sebesar 48,21 juta rupiah perorang pertahun. Apabila melihat kondisi ketenagakerjaan, bisa disimpulkan bahwa dari aspek ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan

dinilai cukup baik, namun pada kenyataannya pendapatan terdistribusi sangat timpang.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh perubahan struktur memang merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak cukup dengan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah jumlah penduduk miskin tidak mengalami peningkatan dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Dudley dan Seers merujuk 3 (tiga) sasaran utama dari pembangunan, yaitu: *1.What has been happening to poverty? 2.What has been happening to unemployment? 3.What has been to inequality?* (Hasan, 2018)

Dalam pertanyaan yang diajukan oleh Profesor Dudley tersebut, penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan yang harus diatasi dalam proses pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan ekonomi, selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan juga merupakan tujuan yang harus dicapai. Permasalahan ketimpangan pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang penting untuk diatasi karena berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial. Todaro (2006), menyebutkan dua alasan mengapa ketimpangan harus diperhatikan yaitu, ketimpangan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.

Realitas menunjukkan keterkaitan erat antara ketimpangan dan kualitas hidup suatu bangsa. Bahkan kondisi sosial masyarakat yang rusak dan situasi

ekonomi yang carut marut dipercaya merupakan salah satu dampak jangka panjang dari ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Ada banyak studi yang dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dampak kongkrit penurunan terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Paling tidak, dampak tersebut dikelompokkan dalam beberapa aspek diantaranya adalah tingkat kriminalitas, tingkat kebahagiaan, tingkat kesehatan, kualitas *social trust*, dan tingkat kestabilan politik.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan pendapatan, maka diperlukan strategi khusus untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar di Sulawesi Selatan. Ketimpangan yang semakin memburuk di Sulawesi Selatan pada akhirnya juga akan berdampak pada semakin memburuknya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chongvilaivan (2013) dengan menggunakan dekomposisi indeks theil, ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Indonesia tahun 2007, sebesar 93,9 persen disumbang oleh ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam provinsi itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pengaruh transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan melalui variabel antara penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita dengan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dinamika Sektor Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan sektor primer secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana perubahan sektor sekunder secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana perubahan sektor tersier secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis perubahan sektor primer secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita.
2. Mengetahui dan menganalisis perubahan sektor sekunder secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sektor tersier secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai ketimpangan pendapatan dan Dinamika sektor ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN TEORI**

##### **2.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan**

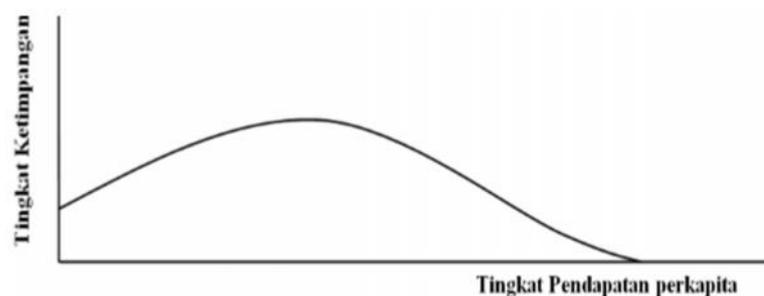
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitasnya. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang terjadi jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan pendapatan yang terjadi menunjukkan bahwa pendapatan rendah dinikmati sebagian besar penduduk dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser 2006).

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, yang terjadi karena semakin sulitnya masyarakat mengakses kredit terutama penduduk miskin, sedangkan penduduk kaya cenderung lebih konsumtif untuk barang mewah

2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

Kuznetz (1955) menyatakan bahwa pendapatan di sektor industri dan jasa bukan hanya tinggi tetapi juga tidak merata sehingga ketika pertumbuhan ekonomi mengarah pada semakin besarnya peran kedua sektor tersebut maka akan terjadi perbedaan distribusi pendapatan yang semakin memburuk atau semakin timpang. Akan tetapi ketika perekonomian mencapai level yang paling tinggi maka akan terjadi redistribusi pendapatan melalui transfer pendapatan kepada faktor produksi dalam proses pembangunan sehingga distribusi akan semakin membaik. Konsep yang dikemukakan oleh Kuznetz tersebut selanjutnya dikenal luas dengan nama konsep kurva Kuznetz U terbalik yang diambil dari bentuk kurvanya yang terlihat pada Gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1 Kurva “U” terbalik (Hipotesis Kuznetz)**

Dari pernyataan tersebut muncullah pertanyaan mengapa pada waktu proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang ketimpangan meningkat. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang kesempatan dan peluang pembangunan

yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga faktor sosial dan budaya sehingga akibat ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah yang dikarenakan kondisinya lebih baik. Sedangkan pada daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi; pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. Pada tahap pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern (dalam model Lewis). Pada tahap ini, lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan dalam sektor modern yang telah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan (Arsyad, 2010).

Menurut Nikoloski (2009) validitas hipotesis Kuznets telah diselidiki berulang kali dan dengan hasil yang bertentangan. Beberapa Penelitian telah mengkonfirmasi hal tersebut dan sebagian besar tidak menemukan bukti keberadaan hubungan deterministik. Pendapatan (McKay et al (2003)) White dan Anderson (2001) menemukan bahwa "efek pertumbuhan" telah menjadi sumber utama pertumbuhan pendapatan bagi kaum miskin di negara berkembang. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ravallion (2001) berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan telah lebih berhasil di negara-negara berkembang yang menggabungkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan ketidaksetaraan yang menurun. Barro (2000) menemukan bukti bahwa pertumbuhan mengurangi ketimpangan. Selain itu, Birdsall, Ross dan Sabat (1995) menemukan bukti bahwa pertumbuhan jangka panjang mengurangi ketimpangan (melalui meningkatkan pencapaian pendidikan dalam jangka panjang). Panizza (2002) menemukan bukti serupa berkaitan dengan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan. Akhirnya, Stephen Knowles (2005) mengambil pendekatan berbeda dalam mengukur ketimpangan dan ia masih menemukan hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan dalam jangka panjang (Dalam Nikoloski, 2009).

Lebih lanjut Nikoloski (2009) menjelaskan bahwa yang harus dicatat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan adalah sangat kompleks karena terdapat hubungan kausalitas. Beberapa penelitian empiris juga telah menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih rendah (Persson dan Tebellini (1994); Allesina dan Rodrik (1994) dan Deninger dan Squire (1996)).

Adelman Morris (1973) sebagaimana dikutip oleh Bryant dan White (1982) menyatakan bahwa pembangunan pada mulanya disertai dengan penurunan absolut maupun relatif pada pendapatan rata-rata kelompok penduduk miskin dan setelah itu lama-kelamaan kelompok-kelompok itu akan memasuki ekonomi upah, pada titik inilah ketidakmerataan secara bertahap akan berkurang. Sedangkan Susanti et al. (1995) menyatakan bahwa perbedaan distribusi pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya, faktor produksi, dan kepemilikan barang-barang modal (capital stock). Pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Dalam pandangan teori Neoklasik perbedaan kepemilikan faktor produksi akan terjadi pembagian "kue kesejahteraan" bukan dari atas ke bawah, tetapi kekayaan daerah mengalir ke pusat dan yang melahirkan ketimpangan pendapatan.

Myrdal berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat menghasilkan suatu proses sirkuler yang membuat pemilik modal mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tidak memiliki modal menjadi semakin miskin. Proses ini semakin memperlebar ketimpangan pembangunan di negara-negara terbelakang. Ketimpangan ini disebabkan oleh sistem ekonomi yang bermotif mengejar laba. Motif inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di daerah yang memiliki potensi keuntungan yang besar, sementara daerah lain tetap terlantar. Hal ini disebabkan kekuatan pasar bebas, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional.

Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2012).

Pendapat lain, menyatakan bahwa ketidakmerataan pembagian pendapatan terjadi akibat dari ketidaksempurnaan pasar yang diartikan sebagai adanya gangguan sehingga pasar tidak dapat bekerja secara sempurna yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepemilikan informasi, intervensi pemerintah, dan yang paling sering terjadi di negara berkembang adalah adanya kolusi antara beberapa pelaku ekonomi dengan pemerintah. Secara umum menurut Adelman dan Morris dalam Arsyad (2010), ada delapan penyebab timbulnya ketidakmerataan distribusi pendapatan, yaitu: a) pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita, b) inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh penambahan produksi barang-barang, c) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, d) investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, e) rendahnya mobilitas social, f) pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri, g) memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang masih berkembang dalam perdagangan dengan negara yang maju, h) hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

### 2.1.1 Indikator Pengukuran Distribusi Pendapatan

Terdapat dua ukuran pokok yang digunakan dalam menganalisa distribusi pendapatan yaitu distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) dan distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (*functional or factor share distribution of income*) (Todaro dan Smith 2006). *Size distribution of income* secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Berdasarkan ukuran ini, cara mendapatkan penghasilan tidak dipermasalahkan, apa yang lebih diperhatikan dari ukuran ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan. Sedangkan *functional or factor share distribution of income* berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan nasional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini.

Guna mengukur ketimpangan pendapatan di antara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan ukuran size distribution of income. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan atau distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat empat ukuran yang merefleksikan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu indeks gini, ukuran Bank Dunia, indeks Theil dan indeks-L.

#### a. Indeks Gini

Indeks gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Adapun rumus umum indeks gini adalah sebagai berikut:

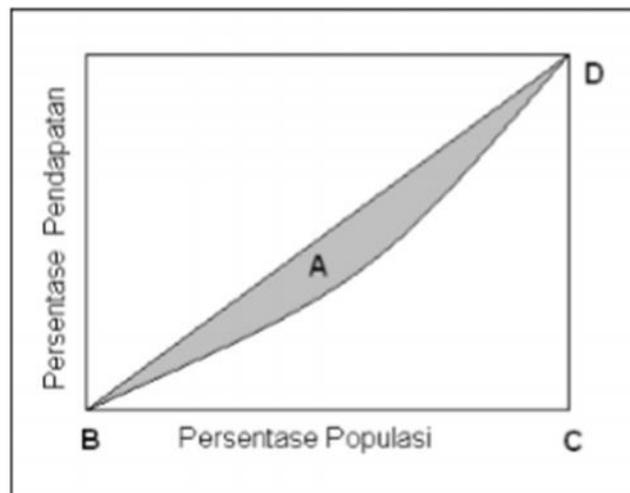
$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (f_i (F_i + F_{i-1} - 1))$$

Dimana: GR merupakan koefisien gini,  $f_i$  merupakan frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- $i$ ;  $F_i$  merupakan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $i$  dan  $F_{i-1}$  merupakan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke ( $i-1$ ).

Cara lain yang sering digunakan untuk menghitung indeks gini adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Indeks gini dirumuskan sebagai rasio antara luas bidang yang terletak antara kurva Lorenz dan garis diagonal (luas bidang A) dengan luas separuh segi empat, dimana kurva Lorenz berada (luas bidang BCD). Rumusan ini di ilustrasikan pada Gambar 2.2 berikut:

$$GR = \frac{\text{Luas Bidang A}}{\text{Luas Bidang BCD}}$$

**Gambar 2.2 Kurva Lorenz**



Arsyad (2010) Menerangkan bahwa besarnya ketimpangan digambarkan oleh daerah A, sedangkan indeks gini adalah rasio perbandingan antara luas bidang A dengan luas segitiga BCD. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Dengan demikian angka koefisiennya sama dengan nol. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah A akan sama dengan luas segitiga, sehingga indeks gini bernilai satu. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai indeks gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai indeks gini makin mendekati satu. Menurut Todaro dan Smith (2006), kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks gini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Indeks Gini**

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$X = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$X = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

**b. Ukuran Bank Dunia**

Cara lain yang juga sering diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia, dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu:

1. 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah.
2. 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah.
3. 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi.

Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Selain dari sisi pendapatan, pengukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran. Karena data pengeluaran lebih mudah diperoleh, maka

pengukuran ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia ini lebih sering menggunakan data pengeluaran. Namun, pengukuran ketimpangan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran memiliki kelemahan antara lain data yang disajikan akan underestimate dibandingkan bila data yang dipergunakan adalah data berdasarkan pendapatan. Hal ini disebabkan adanya sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai tabungan (saving). Penyebab lainnya adalah adanya transfer pendapatan. Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
2. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah;
3. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

### **c. Indeks Theil dan Indeks-L**

Ukuran ketimpangan pendapatan lain yang banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan “generalized entrophy”, adapun rumus “generalized entrophy” umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[ \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\frac{y}{y}\right) \right]^{\alpha} - 1$$

Nilai GE bervariasi antara 0 dan dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

### 2.1.2 Teori Transformasi Struktural (Dinamika Sektor Ekonomi)

Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi. Berdasarkan model pembangunan dua sektor Arthur Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yakni: (1) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol, kondisi ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja (surplus labor) sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya dan (2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten.

Model dua sektor Arthur Lewis memusatkan perhatian utamanya pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan oleh adanya perluasan output sektor modern. Kecepatan perluasan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sangat tergantung pada tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern.

Peningkatan investasi dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi bahwa para pemilik modal yang berkecimpung di sektor modern menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Asumsi selanjutnya adalah tingkat upah pada sektor modern diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian subsiten tradisional. Tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30% lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan di daerah pedesaan untuk memaksa para pekerja pindah dari desadesa asalnya ke kota (Todaro dan Smith, 2006) Perubahan struktur ekonomi tersebut ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa, baik dalam produk domestik bruto (PDB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan merubah pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang pertanian. Peningkatan pendapatan masyarakat akan menggeser permintaan masyarakat dari barang-barang makanan (pertanian) ke barang-barang non makanan (industri dan jasa). Hal ini sejalan dengan hukum Engel

yang menyatakan elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang-barang pertanian menurun seiring meningkatnya pendapatan.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi barang-barang bernilai tinggi dan keterbatasan fisik masyarakat dalam mengonsumsi makanan. Negara dengan penghasilan yang rendah memiliki elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang-barang makanan berkisar 0,6-0,9, sementara negara maju memiliki elastisitas berkisar 0,2-0,3. Sementara elastisitas pendapatan terhadap barang-barang industri diatas 1 yakni berkisar antara 1,11 sampai 1,90 (Budiharsono, 1996).

Perubahan pola konsumsi tersebut akan meningkatkan output sektor industri (modern) sehingga menyerap tenaga kerja dengan produktivitas marginal nol yang ada di sektor tradisional (Todaro dan Smith, 2006). Oleh karenanya, sektor industri seringkali dijadikan tolok ukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara; semakin tinggi kontribusi sektor industri dalam perekonomian, semakin maju pula perkembangan pembangunan ekonominya. Pada banyak negara berkembang, laju transformasi struktur tenaga kerja relatif lebih lambat dibandingkan dengan laju transformasi struktur output. Fenomena tersebut berkaitan erat dengan kritikan terhadap model dua sektor Arthur Lewis yang dianggap gagal menjelaskan fenomena tersebut. Ada beberapa asumsi yang ternyata sama sekali tidak cocok dengan kenyataan institusional dan ekonomis di sebagian negara berkembang (dunia ketiga).

Pertama, model ini secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern

sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Semakin cepat tingkat akumulasi modalnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern dan semakin cepat pula penciptaan lapangan kerja baru. Akan tetapi pada kenyataannya keuntungan yang didapat oleh para pemilik modal justru diinvestasikan kembali dalam bentuk barang-barang modal yang lebih canggih dan lebih hemat tenaga kerja bukan pada barang modal yang hanya merupakan duplikasi dari modal yang sudah ada sebelumnya.

Kedua, asumsi terjadinya surplus tenaga kerja di pedesaan dan terjadinya kondisi full employment di perkotaan tidak terbukti pada sebagian Negara-negara berkembang. Faktanya jumlah pengangguran di perkotaan cukup besar sebaliknya surplus tenaga kerja di pedesaan relatif sedikit. Ketiga, dugaan tentang adanya pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern akan menjamin keberlangsungan upah riil di perkotaan tetap konstan sampai surplus tenaga kerja habis terpakai. Pada kenyataannya tingkat upah dan pasar tenaga kerja perkotaan di hampir semua negara sedang berkembang cenderung meningkat sangat besar dari waktu ke waktu baik secara absolut maupun secara relatif, yakni apabila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di daerah pedesaan. Keempat, ketidaktepatan asumsi yang mengatakan bahwa tingkat hasil akan semakin menurun pada sektor industri modern. Banyak fakta membuktikan bahwa sektor industri modern mengalami peningkatan.

Kekurangan pada model dua sektor Arthur Lewis disempurnakan oleh model perubahan struktural. Model tersebut disusun berdasarkan penelitian empiris Hollis B. Chenery yang meneliti pola-pola pembangunan di sejumlah negara Dunia Ketiga selama kurun waktu pasca perang dunia kedua. Bahan-

bahan studi meliputi transisi dari pola perekonomian agraris ke perekonomian industri, kesinambungan akumulasi modal fisik dan manusia, perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok dan pangan ke berbagai barang dan jasa manufaktur, perkembangan daerah perkotaan terutama pusat-pusat industri berkat migrasi para pencari kerja dari daerah pertanian pedesaan dan kota-kota kecil serta pengurangan jumlah anggota setiap keluarga. Dalam proses pembangunan, pertama-tama pertumbuhan populasi akan meningkat sebelum akhirnya menurun.

Hipotesis utama dari model perubahan struktural adalah pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati yang ciri-ciri pokoknya sama di semua negara. Perbedaan dapat terjadi di antara satu negara berkembang dengan yang lain dalam hal langkah-langkah yang ditempuhnya serta pola umum pembangunannya yang semuanya ditentukan oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah dan jenis sumber daya yang dimiliki masing-masing negara, ketepatan rangkaian kebijakan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, tersedianya modal dan teknologi dari luar, serta kondisi-kondisi lingkungan perdagangan internasional

## **2. 2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Dinamika Sektor Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan**

Banyak perhatian yang telah diberikan terhadap perubahan distribusi pendapatan dalam masa pembangunan. Salah satunya dikemukakan oleh Kuznetz yang terkenal dengan hipotesis Kuznetz U terbalik, dengan

menggunakan data antar negara (cross section) dalam jangka waktu tertentu (time series), Kuznetz (1955) menemukan hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita dalam bentuk kurva U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi atau perubahan dalam struktur ekonomi dari suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses industrialisasi, pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor Pertanian) atau pada saat pangsa pertanian kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Pergerakan sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, hal ini terjadi saat kontribusi sektor primer menurun dan meningkatnya kontribusi sektor sekunder, perubahan dari sektor sekunder ke sektor tersier terjadi saat kontribusi sektor sekunder menurun dan meningkatnya kontribusi sektor tersier, sedangkan perubahan dari sektor primer ke sektor tersier, terjadi saat penurunan kontribusi sektor primer dan meningkatnya kontribusi sektor tersier. Tiga perubahan struktur ekonomi ini akan mempengaruhi distribusi pendapatan, hal ini sesuai dengan Field (1980) bahwa perubahan struktur ekonomi akan mempengaruhi distribusi pendapatan yaitu dapat menurunkan, meningkatkan, bahkan tidak mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan samasekali. Perubahan struktur ekonomi akan menurunkan tingkat ketimpangan jika diikuti oleh transfer tenaga kerja dari sektor yang ditinggalkan ke sektor yang dituju.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Alesina and Rodrik (1994), Perotti (1996), Afranca (2000), dan Pardo-Beltran (2002) lebih mendukung pandangan yang mengatakan bahwa distribusi pendapatan-lah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan fakta bahwa pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Alesina and Rodrik (1994) secara umum mengikuti argument Perotti (1992) yang menjadi awal bahwa konfigurasi awal sumber daya membentuk perjuangan politik untuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan dalam jangka panjang, Perotti (1992) menyimpulkan bahwa ketimpangan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus selalu diikuti oleh transformasi struktural dimana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain. Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi (Szirmai *et al.* 2012).

### **2.2.2 Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja dan Ketimpangan Pendapatan**

Penduduk merupakan salah satu modal dasar utama dalam pembangunan. penduduk yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohani yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan sangat membantu dalam pembangunan. Penduduk mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan penduduk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan

ekonomi sebagai tenaga kerja. Penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja menurut kegiatan utamanya dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

Field 1980 dalam Zikro (2006) dengan menggunakan kurva Lorenz, melakukan sebuah kajian analisis tentang hubungan antara pergeseran sektor-sektor ekonomi dengan pola distribusi pendapatan kajian analisis ini didasari pada teori two sector surplus labour dari Lewis (1954) yang menyatakan bahwa proses pembangunan akan menghasilkan transfer tenaga kerja dari sektor tradisional (pertanian di pedesaan yang surplus tenaga kerja) ke sektor modern di perkotaan. Dari hasil penelitian Field berhasil memperlihatkan sebuah kajian analisis bagaimana hubungan antara pergeseran peran sektor ekonomi dengan pola distribusi pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara penduduk bekerja dengan tingkat ketimpangan yang terjadi.

Penelitian Checchi (2008) yang membahas tentang dampak keseluruhan lembaga pasar tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan rumah tangga. Hasil yang telah didapatkan bahwa lembaga pasar tenaga kerja menunjukkan korelasi yang signifikan dengan distribusi pendapatan lintas negara dan dari waktu ke waktu.

Hasil ini memiliki implikasi penting untuk mendiskusikan yang terjadi di Eropa tentang implementasi reformasi pasar tenaga kerja bersama untuk meningkatkan lapangan kerja. Kebijakan yang diusulkan Pemerintah adalah pengurangan legislasi perlindungan kerja yang disebut dengan perjanjian

'*flexicurity*'. Konsekuensi dari kebijakan tersebut kemungkinan akan menjadi peningkatan substansial dalam ketimpangan pendapatan.

Ini menunjukkan bahwa strategi yang mungkin dilakukan adalah dengan menggeser institusi, dengan tujuan mendorong lapangan kerja melalui pengurangan perlindungan kerja, sambil mengimbangi implikasi distribusi kebijakan ini dengan mengembangkan sistem penentuan upah yang meningkatkan porsi upah dalam pendapatan nasional.

### **2.2.3 Hubungan Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan**

Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan telah merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada penggunaan tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Sabir, 2015).

Ahluwalia (1974) menganalisis tentang hubungan antara proses pembangunan dan distribusi pendapatan per kapita. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Kuznetz bahwa pada tahap awal pertumbuhan, yaitu ketika pendapatan per kapita US\$100 sampai US\$600, distribusi pendapatan semakin memburuk yang ditandai dengan proporsi bagi 20% penduduk penerima pendapatan tertinggi semakin besar, sementara

proporsi bagi 40% penduduk penerima pendapatan terendah semakin kecil. Proporsi ini akan tetap (constans) sampai pendapatan per kapita mendekati US\$800, apabila proses pembangunan terus berlanjut, akan membuat proporsi bagi 20% penduduk penerima pendapatan tertinggi akan semakin mengecil yang diiringi dengan peningkatan bagian pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk penerima pendapatan terendah, dan selanjutnya ketimpangan pada distribusi pendapatan akan menurun.

#### **2.2.4 Hubungan Transformasi Struktural (Dinamika Sektor Ekonomi), Penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Perkapita**

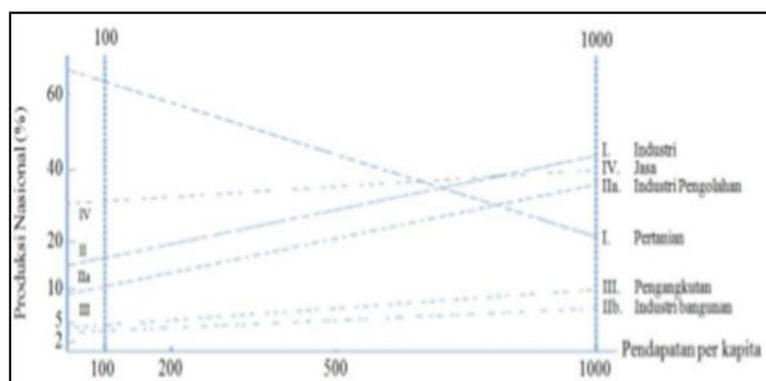
Teori *patterns-of-development* yang dikemukakan Chenery memfokuskan tentang perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan struktur ekonomi, industri, dan kelembagaan secara bertahap pada suatu perekonomian yang terbelakang sebagai akibat meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, sehingga memungkinkan tampilnya industri-industri baru untuk menggantikan kedudukan sektor pertanian sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi (Chenery dan Syrquin 1975).

Hasil penelitian empiris mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa, akumulasi modal fisik dan manusia (sumber daya manusia), perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk, serta family size yang semakin kecil, struktur ekonomi suatu negara bergeser dari yang

semula di dominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan, menuju sektor-sektor non primer khususnya industri.

Penelitian Chenery dan Syrquin (1975) menunjukkan semakin tinggi Produk Nasional Bruto (PNB), maka peranan sektor pertanian di dalam output dan kesempatan kerja semakin menurun, sebaliknya peranan sektor industri dan jasa semakin meningkat. Transformasi diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi, hal ini berarti yang dimaksud dengan perubahan struktur ekonomi adalah terjadinya pergeseran dari satu sektor ekonomi kepada sektor ekonomi lain yang dapat mempengaruhi perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Aspek penting yang dibahas dalam analisis Chenery tentang transformasi ekonomi adalah adanya penekanan mengenai hubungan kuantitatif antara pendapatan per kapita dalam persentase sumbangan sektor-sektor ekonomi terhadap produk domestik bruto tergantung kepada tingkat pendapatan per kapita dan jumlah penduduk pada negara tersebut. Chenery menggambarannya seperti pada Gambar 2.3 berikut ini (Sukirno, 2006):

**Gambar 2.3**  
**Perubahan Peranan Sektor dalam Menciptakan Produksi Nasional**



Menunjukkan perubahan yang terjadi dalam subsektor industri pengolahan dalam proses pembangunan, maka Chenery membagi industri-

industri tersebut ke dalam tiga golongan, yaitu industri barang konsumsi, industri barang mentah, dan industri barang modal. Mengenai perubahan subsektor industri pengolahan, Chenery menunjukkan bahwa pada waktu pendapatan per kapita US\$100 berbagai subsektor industri pengolahan di atas peranannya adalah sebagai berikut; 68% dari produksi subsektor industri itu berasal dari industri barang-barang mentah, dan 12% berasal dari industri barang-barang modal. Kemudian pada tingkat pendapatan per kapita sebesar US\$ 600, komposisi produksi subsektor industri pengolahan adalah sebagai berikut; industri barang-barang konsumsi peranannya menurun dan hanya menghasilkan sebesar 43% dari produksi subsektor industri pengolahan, sedangkan industri barang-barang modal peranannya meningkat, yaitu menghasilkan sebesar 35% dari produksi subsektor industri pengolahan, sementara peranan industri barang-barang mentah tidak mengalami perubahan.

Sementara itu, Teori *stage of development* diprakarsai oleh Collin Clark yang bergabung dengan Fisher. Pemikiran Clark dan Fisher mengenai perubahan struktur ekonomi adalah pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier. Clark dan Fisher berpendapat bahwa makin tinggi pendapatan suatu negara, makin kecil peran relatif sektor primer.

Fisher dalam Fabiomarta (2004) mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier akan mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui struktur ketenagakerjaan dan struktur dana. Clark (1951) menyatakan bahwa terdapat hubungan erat antara perubahan struktur

produksi dan struktur ketenagakerjaan menurut sektor. Pergeseran kesempatan kerja dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Menurut Clark, makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Namun sebaliknya sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja. Menurut Clark-Fischer perekonomian mempunyai tiga tahapan produksi:

1. Produksi primer, yaitu mengekstraksi bahan mentah/baku dari pertanian, pertambangan, perikanan dan kelautan. Negara yang berpendapatan rendah cenderung didominasi oleh kegiatan produksi primer.
2. Produksi sekunder, yaitu produksi industri melalui industri pengolahan, dan konstruksi, negara dengan penghasilan sedang biasanya didominasi sektor ini.
3. Produksi tersier, yaitu mengutamakan kegiatan jasa seperti pendidikan, pariwisata. Negara dengan pendapatan tinggi, sektor produksinya didominasi oleh kegiatan sektor tersier ini. Mendominasinya sektor tersier, menandakan kedewasaan dalam proses pembangunan.

Fisher pada tahun 1935 mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pada gilirannya hal itu akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur produksi yang sesuai dengan pergeseran

permintaannya, yaitu pegeseran kesempatan kerja dan alokasi dana dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier (Fabiomarta 2004).

Clark (1951) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi ekonomi dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas pada setiap sektor dengan mengalihkan tenaga kerja dari yang produktivitasnya rendah ke yang produktivitasnya tinggi. Distribusi tenaga kerja di negara-negara maju saat ini terlihat bahwa proporsi tenaga kerja terbesar terletak pada sektor sekunder dan tersier. Clark dan Fisher (1951) dalam Fabiorta (2004) dengan adanya kemajuan ekonomi suatu masyarakat jumlah tenaga kerja sektor primer cenderung menurun dibandingkan dengan sektor sekunder, dan selanjutnya sektor sekunder juga menurun dibandingkan sektor tersier.

#### **2.2.5 Hubungan Transformasi Struktural (Dinamika Sektor Ekonomi), Penyerapan Tenaga Kerja, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan**

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) dalam Tambunan (2001) tentang transformasi struktur ekonomi, menunjukkan bahwa sejalan pertumbuhan ekonomi kemudian secara simultan diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian (primer) menuju sektor non primer, yaitu sektor industri dan sektor jasa. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara melalui percepatan transformasi struktur ekonomi suatu negara, dikenal teori jebakan pendapatan

menengah (middle income trap). Middle income trap merujuk pada situasi ekonomi suatu negara yang stagnan setelah berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saat perekonomian mengalami stagnan, peningkatan standar hidup pun menjadi stagnan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti masih tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan struktural, dan terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Pertumbuhan yang berkualitas (the quality of growth) merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang secara spesifik dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara cepat, memperkecil ketimpangan struktural, pelestarian terhadap lingkungan hidup, dan terjadinya keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Thomas et al. 2000).

Sejalan dengan hal tersebut Penelitian yang dilakukan oleh Dastidar (2004) menunjukkan hubungan antara perubahan struktur ekonomi dengan distribusi pendapatan, hal ini didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Kuznetz (1955) berdasarkan kajian empirisnya tentang perubahan kontribusi sektor-sektor dalam total output dan penyerapan tenaga kerja. Konsep tersebut adalah; a) bahwa dalam proses pembangunan akan terjadi peningkatan kontribusi dari sektor-sektor non-pertanian yang diiringi dengan penurunan kontribusi dari sektor pertanian terhadap total output dan penyerapan tenaga kerja; b) bahwa pendapatan per kapita di sektor-sektor non-pertanian selalu lebih

besar dari pada pendapatan per kapita di sektor pertanian; c) ketimpangan distribusi pendapatan di sektor pertanian tidak sebesar yang terjadi di sektor non-pertanian.

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Sejumlah Penelitian-penelitian terkait dengan transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan masih terus dilakukan baik yang berupa pengujian hipotesis maupun pengembangan teori lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian:

Caselli dan Wilbur (2001) terkait "*The U.S. Structural Transformation and Regional Convergence: A Reinterpretation*", menyimpulkan bahwa sebagian besar konvergensi regional disebabkan oleh transformasi struktural: konvergensi nasional dari upah pertanian ke upah nonpertanian dan laju transisi yang lebih cepat dari tenaga kerja Selatan dari pertanian ke pekerjaan nonpertanian. Hasil yang serupa menggambarkan Midwest Timur Laut. Untuk menjelaskan pengamatan ini, kami membangun sebuah model di mana Selatan (Midwest) memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang pertanian padat karya yang tidak memerlukan keterampilan. Jadi itu dimulai dengan bagian yang tidak proporsional dari tenaga kerja tidak terampil dan pendapatan per kapita yang lebih rendah. Seiring waktu, penurunan biaya pendidikan atau pelatihan mendorong peningkatan proporsi angkatan kerja untuk keluar dari sektor pertanian (tidak terampil) dan masuk ke sektor non-pertanian (terampil). Penurunan tenaga kerja pertanian menyebabkan peningkatan relatif terhadap upah pertanian.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Golling (2002) melakukan penelitian mengenai "*Structural Transformation and Cross-Country income Differences*", menyimpulkan bahwa produktivitas pertanian yang rendah dapat menunda dimulainya industrialisasi di suatu negara untuk jangka waktu yang lama, menyebabkan pendapatan per kapita suatu negara jauh di belakang negara industri. Begitu industrialisasi dimulai, tren ini terbalik. Namun, sejauh mana suatu negara mengejar terutama bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam kegiatan non-pertanian. Kebijakan pertanian, sebagian besar tidak relevan dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, negara yang mengalami peningkatan besar dalam produktivitas pertanian.

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Benjamin et al. (2005) yang meneliti ketimpangan distribusi pendapatan selama proses transformasi struktur ekonomi di Cina tahun 1987-2002. Hasil penelitian menemukan bahwa di daerah pedesaan, terjadi peningkatan ketimpangan terutama terkait dengan disequalizing. Hal ini terjadi karena meningkatnya pendapatan wirausahawan non-pertanian, sementara pendapatan di bidang pertanian semakin menurun. Sedangkan peningkatan ketimpangan pendapatan pada daerah perkotaan saat terjadi transformasi perekonomian lebih dikarenakan adanya restrukturisasi dalam perekonomian.

Novalia (2014) dengan judul "Dampak Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia", menyimpulkan ada perbedaan pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antara daerah berkembang dan daerah maju. Pada daerah

berkembang, proses perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, dari sektor sekunder ke sektor tersier dan dari sektor primer ke sektor tersier dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan bila terjadi penurunan kontribusi sektor primer, sedang pada daerah maju terjadi hal sebaliknya, proses perubahan struktur ekonomi tidak meningkatkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena rata-rata sektor primer yang berkembang pada daerah berkembang adalah subsektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan subsektor dengan kemampuan menyerap banyak tenaga kerja sehingga jika kontribusinya menurunnya ketimpangan akan meningkat, sedangkan pada daerah maju sektor primer yang berkembang adalah subsektor pertambangan dan penggalian yang hanya bisa dinikmati dan diakses oleh sebagian kecil masyarakat, sehingga jika sektor primer menurun ketimpangan juga menurun. Jika variabel tingkat ketimpangan awal tinggi pada daerah maju maupun pada daerah berkembang cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan variabel pertumbuhan ekonomi pada daerah berkembang dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan saat terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan dari sektor primer ke sektor tersier, sedangkan pada daerah maju justru meningkatkan ketimpangan pendapatan ketika terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder.

Sementara itu, penelitian Saraan (2006) dalam Fabiomarta (2004) menggunakan data *key indicator of developing asian and pasific countries* tahun 1980-2004 dengan metode Ordinary Least Square menyimpulkan bahwa telah terjadi transformasi struktural perekonomian di Indonesia pada periode

pengamatan, yaitu transformasi sektor pertanian ke sektor industri. Selanjutnya, Fabiomarta (2004) dengan metode yang sama mengembangkan model Chenery-Syrquin untuk data Indonesia tahun 1977-2002 menemukan adanya kecenderungan menurunnya peranan sektor primer. Sementara itu, Hill (1996) menguraikan transformasi struktural pada periode 1966–1992 dengan obyek penelitian perekonomian Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu tersebut dinilai terlalu cepat. Hal ini ditandai dengan sumbangan sektor pertanian terhadap Gross Domestic Product (GDP) telah menyusut hingga kurang dari setengahnya sejak tahun 1966, dan pada tahun 1992 sumbangannya hanya tinggal 36 persen. Penurunan ini ternyata diikuti dengan kenaikan sumbangan sektor industri (secara luas mencakup pertambangan, industri manufaktur, fasilitas umum dan konstruksi), yang sumbangannya pada saat itu sebesar 35 persen lebih besar dari nilainya pada pertengahan dekade 1960-an.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiharsono (1996), tentang transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia periode 1969-1987 menunjukkan bahwa secara relatif provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibanding provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di KBI disebabkan kualitas sumberdaya manusia yang relatif lebih baik, dan struktur industri dan pertanian, khususnya perkebunan besar yang relatif sudah maju. Sedangkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di KTI disebabkan antara lain rendahnya kualitas sumberdaya manusia, masih minimnya sarana prasarana ekonomi, dan adanya proyek-proyek pembangunan

yang tidak mengindahkan hak-hak masyarakat lokal. Selanjutnya pola transformasi struktural antar daerah pada kurun waktu 1969-1987 terjadi penyimpangan apabila dibandingkan dengan pola normal Chenery-Syrquin. Hal ini karena relatif kecilnya keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan sektor industri baik dalam proses produksi maupun penyerapan tenaga kerja.

Hasil yang serupa juga didapatkan dalam Kurniawan (2011), meneliti tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia, pendekatan model Input-Output tahun 1971-2008 menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan proses perubahan struktur perekonomian yang terjadi pada negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China) dalam jangka waktu sekitar 40 tahun menunjukkan pola yang berbeda. Pergeseran struktur GDP negara-negara BRIC diawali pergeseran peran sektor pertanian oleh sektor industri yang selanjutnya diikuti peningkatan peran sektor jasa. Pergeseran struktur yang terjadi di Indonesia diawali pada kondisi dimana sektor jasa telah mendominasi perekonomian, selanjutnya terjadi peningkatan peran sektor industri menggeser sektor pertanian dan akhirnya mendominasi perekonomian. Perkembangan struktur tenaga kerja di Indonesia menunjukkan pola yang tidak biasa (*unusual pattern*) dan bertentangan dengan teori perkembangan tenaga kerja. Tinjauan tentang tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan justifikasi kesimpulan atas apa yang terjadi bahwa sebenarnya tenaga kerja yang bergeser dari sektor pertanian tidak beralih ke sektor yang produktivitasnya lebih tinggi. Daya penyebaran yang tinggi pada sektor-sektor sekunder tidak diikuti derajat kepekaan yang tinggi pada sektor-sektor primer

mengindikasikan tidak adanya link and match antara industri yang dibangun dengan sumber bahan baku yang tersedia. Strategi industrialisasi yang kurang tepat menyebabkan proses deindustrialisasi di Indonesia berjalan tidak alami dan cenderung negatif.

Perbedaan antara studi empirik dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya kebanyakan meneliti dengan mengkombinasikan variabel kebijakan pembangunan dan variable terukur dalam pembangunan. Sementara itu, saya mencoba memadatkan seluruh variabel dalam penelitian sebelumnya dengan fokus terhadap variable ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan, sehingga membentuk hubungan antara transformasi struktural terhadap penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan dengan mengambil studi kasus yang berfokus pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.